

Manajemen Pra Bencana Alam Di Kabupaten Bima Dalam Perspektif Collaborative Governance

Nurlaila

lailaamin975@gmail.com

Mas'ud

Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Mbojo Bima

Abstraksi

Tujuan penelitian ini untuk melihat collaborative governance terutama pada tahap pra bencana, dan sejauh mana kerjasama serta upaya-upaya yang telah dilakukan berbagai aktor untuk mengantisipasi bencana di Kabupaten Bima. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Subyek penelitian ini dipilih melalui teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data terdiri atas observasi observation, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan manajemen prabencana di Kabupaten Bima dilakukan dengan pendekatan collaborative governance melalui prinsip koordinasi, keterpaduan, kemitraan, dan pemberdayaan. Dengan keterlibatan seluruh element sebagai perwujudan yang demokratis partisipatif dalam upaya penanggulangan bencana. Dalam pendekatan ini Badan Penanggulangan Bencana bertindak sebagai leading sector berupaya untuk mengimplementasikan program-program yang ada dalam Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah dengan kerjasama lintas sektoral. Dalam implementasinya BPBD bertindak sebagai koordinator, fasilitator, motivator, sekaligus pelaksana program-program. Melalui kolaborasi tersebut menghasilkan strategi penanggulangan bencana melalui penguatan aturan dan kapasitas kelembagaan yang difokuskan untuk mencapai penguatan kerangka Hukum penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan peningkatan kapasitas serta akuntabilitas tata kelola penanggulangan bencana. Proses kerjasama ini juga telah mengintegrasikan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) kedalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan seluruh SKPD. Pemerintah Daerah juga bekerjasama dengan perguruan tinggi dalam mengembangkan hasil-hasil riset yang dapat diterapkan secara langsung oleh Pemerintah, individu dan keluarga seperti pembangunan rumah aman Gempa, sumur resapan dan lainnya. Diharapkan dengan adanya beberapa riset terkait penanggulangan bencana di Kabupaten Bima dapat menurunkan kerentanan daerah terhadap risiko multi bahaya.

Keywords: Penanggulangan, prabencana, collaborative Governance, Kabupaten Bima.

Abstract

The purpose of this research is to see collaborative governance, especially at the pre-disaster stage, and the extent of cooperation and efforts that have been made by various actors to anticipate disasters in Bima Regency. This study used descriptive qualitative method. The subjects of this study were selected through a purposive sampling technique. Data collection techniques consist of observations, interviews and documentation. The results of the research show that the implementation of pre-disaster management in Bima Regency was carried out using a collaborative governance approach through the principles of coordination, integration, partnership and empowerment. With the involvement of all elements as participatory democratic manifestations in disaster management efforts. In this approach the Disaster Management Agency acts as the leading sector trying to implement the programs contained in the Regional Disaster Management Plan Document with cross-sectoral collaboration. In its implementation BPBD acts as a coordinator, facilitator, motivator, as well as executor of programs. Through this collaboration, a disaster management strategy is produced through strengthening regulations and institutional capacity which is focused on achieving strengthening of the legal framework for implementing disaster management and increasing capacity and accountability for disaster management governance. This collaboration process has also integrated the Disaster Management Plan (RPB) into the strategic plans and annual work plans of all SKPDs. The Regional Government also cooperates with universities in developing research results that can be applied directly by the Government, individuals and families such as the construction of earthquake safe houses, infiltration wells and others. It is hoped that the existence of several research

related to disaster management in Bima Regency can reduce the vulnerability of the region to the risk of multiple hazards.

Keywords: Management, pre-disaster, collaborative governance, Bima district.

1. Pendahuluan

Penyelenggaraan penanggulangan pra bencana merupakan salah satu tugas penting bagi pemerintah guna memberikan perlindungan kepada masyarakat dari adanya ancaman bencana (Zagarino et al., 2021). Sebab kehadiran suatu bencana akan dapat membahayakan keselamatan masyarakat dan mengakibatkan banyak kerusakan dan juga kerugian bagi negara. Melakukan upaya-upaya pencegahan guna mempersiapkan kehadiran suatu bencana harus dapat dimaksimalkan oleh pemerintah agar dapat meminimalisir dampak yang akan ditimbulkan (Andini et al., 2020).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pada pasal 33 dijelaskan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas tiga tahap meliputi : 1) pra bencana, 2) saat tanggap darurat, 3) dan pasca bencana. Upaya pra bencana menjadi tahapan yang sangat penting untuk dapat dimaksimalkan agar keseluruhan proses penanggulangan bencana dapat berjalan dengan baik (Machruf et al., 2020).

Fenomena bencana khususnya bencana alam merupakan salah satu dari sekian banyak masalah publik yang dihadapi masyarakat Indonesia (Roskusumah, 2015). Bencana alam merupakan suatu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain yaitu berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor (Heryati, 2020).

Kabupaten Bima merupakan salah satu Daerah di Indonesia yang memiliki keindahan alam yang luar biasa, kendati demikian Kabupaten Bima juga merupakan daerah yang rawan akan bencana alam. Wilayah Kabupaten Bima sebagian besar (70%) merupakan daerah pegunungan bertekstur dataran tinggi sehingga rawan longsor dan banjir bandang setiap tahunnya (Cahyono, 2020). Menurut data Kompas dan republika tahun 2020, dari bulan januari sampai maret 2020 sebagian wilayah Kabupaten Bima diterjang banjir parah di Kecamatan Sanggar, Monta, Wera, Bolo, Palibelo, dan Sape.

Selain itu, bencana di Kabupaten Bima juga didominasi oleh gempa bumi, gelombang pasang, banjir rob dan abrasi, kebakaran hutan, kekeringan, cuaca ekstrem, gunung api, keracunan akibat intrusi air laut, epidemi, dan wabah penyakit (Faizah, & Buchori, et al., 2019). Menurut data Republika

tahun 2020, Kabupaten Bima juga merupakan daerah yang terdampak kekeringan di NTB sejak bulan Juli 2020, yaitu sebanyak 35 desa di sembilan kecamatan dengan jumlah 5,660 jiwa yang terdampak.

Keresahan yang dirasakan sebagian besar masyarakat Kabupaten Bima ini tentu menjadi sebuah masalah publik yang harus dapat segera ditangani oleh pemerintah Kabupaten Bima, salah satunya adalah dengan cara melakukan upaya-upaya pencegahan dan upaya-upaya pra bencana guna mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan saat bencana alam terjadi. Paradigma yang saat ini sedang berkembang dalam tata kelola pemerintahan salah satunya adalah konsep *collaborative governance*.

Collaborative governance dimaknai sebagai sebuah proses dimana organisasi-organisasi yang memiliki kepentingan terhadap suatu masalah tertentu berusaha bekerjasama dengan mencari solusi yang ditentukan secara bersama dalam rangka mencapai tujuan yang mereka tidak dapat mencapainya secara sendiri-sendiri (Febrian, 2016). Dengan demikian, persoalan bencana alam di Kabupaten Bima dalam perspektif *collaborative governance* dianggap penting dan dapat menjadi salah satu solusi untuk menemukan cara yang efektif dan efisien bagi pemerintah dalam menangani masalah ini (Ansell & Gash, 2008). Kerjasama kolaboratif (*collaborative governance*) dapat dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, sektor swasta dan juga aktor-aktor kebencanaan guna melakukan upaya-upaya pra bencana untuk bersiap dalam menghadapi bencana alam yang sewaktu-waktu dapat terjadi (Zaenuri, 2012).

Penerapan konsep *collaborative governance* dalam menghadapi persoalan bencana alam di Kabupaten Bima khususnya dalam melakukan upaya-upaya pencegahan dan persiapan pra bencana akan dapat memaksimalkan pelayanan publik dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana alam (Irwan, 2018). Manfaat lain dengan adanya kerjasama kolaboratif dalam mengatasi masalah bencana alam adalah pemerintah akan mendapatkan dukungan sumberdaya dari masyarakat dan sektor swasta, meningkatkan partisipasi masyarakat dan sektor swasta, terjaringnya aspirasi masyarakat, meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah, dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik (Ahdi, 2015).

Mengingat bahwa Kabupaten Bima merupakan daerah yang rawan akan bencana alam, dan juga pentingnya penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Bima, maka adapun tujuan penelitian ini untuk melihat *collaborative governance* terutama pada tahap pra bencana yang dinilai masih kurang dimaksimalkan serta guna melihat sejauh mana kerjasama serta upaya-upaya yang telah dilakukan berbagai aktor untuk

mengantisipasi bencana alam yang dapat mungkin terjadi kapan saja di wilayah Kabupaten Bima.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini berada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bima, serta organisasi Pemerhati Lingkungan Hidup di Kabupaten Bima, lokasi tersebut sangat strategis dalam melihat studi kasus dan permasalahan yang terjadi. Subyek penelitian ini dipilih melalui teknik *nonprobability sampling*, dengan menggunakan teknik purposive sampling atau teknik penentuan sampel dengan mempertimbangkan aspek tertentu. Teknik pengumpulan data terdiri atas observasi observation, wawancara dan dokumentasi. Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap dari lapangan, tahap berikutnya yang harus lakukan adalah tahap analisa data. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisa data model interaktif, yang terdiri dari dari tiga hal utama, yaitu; reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Idrus, 2009).

3. Hasil dan Pembahasan

Collaborative Governance dalam Manajemen Prabencana di Kabupaten Bima

Keberhasilan penyelenggaraan penanggulangan bencana tentu sangat mengacu pada kemampuan lembaga Pemerintah Daerah Kabupaten Bima untuk membuat kebijakan dan melaksanakannya secara efektif (Haeril et al., 2022). Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, terdapat prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana antarlain, dilakukan melaui prinsip koordinasi, keterpaduan, kemitraan, dan pemberdayaan (Ibrahim et al., 2020).

Karena pada dasarnya Penanggulangan Bencana Kabupaten Bima merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Bima dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana khususnya di Kabupaten Bima dan sekaligus wujud dan peran serta pemerintah daerah Kabupaten Bima dalam mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana secara nasional. Pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Bima merupakan tanggung jawab bersama dengan pemerintah daerah sebagai penanggung jawab utama (Haeril, Anilawati, et al., 2021).

Untuk itu syarat pokok dalam upaya penanggulangan bencana adalah keterpaduan antar lembaga dan sektor dalam prinsip integratif yang berdasar pada kerjasama atau kemitraan antar seluruh pihak termasuk dengan masyarakat lokal (Dhafri, 2021). Karena dengan keterlibatan seluruh element sebagai perwujudan yang demokratis partisipatif dalam upaya penanggulangan bencana sehingga nantinya akan mampu mengidentifikasi, mengkodifikasikan, dan berbagi pengetahuan yang kemudian dapat digunakan oleh pengambil kebijakan dalam hal ini Pemerintah Daerah untuk dijadikan acuan dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Bima (Ulum, 2009).

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah mensyaratkan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada daerah-daerah yang memiliki tingkat risiko bencana tinggi (Astheria, 2016). Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan organisasi resmi pemerintah Daerah Kabupaten Bima untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan dan mitigasi bencana, kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara kemudian melakukan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terarah, terpadu, dan menyeluruh (Ariyanto, 2018).

Melalui Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 tahun 2008 tentang Pembentukan, susunan, kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bima. Pembentukan BPBD Kabupaten Bima diharapkan dapat menjamin keterpaduan dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan operasional penanggulangan bencana daerah secara terarah dan terpadu. Selain itu juga diharapkan dapat menjadi lembaga yang mampu mengkoordinasikan segala upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Bima (Haeril, Mas'ud, et al., 2021).

Sebagai *leading sector* dalam upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Bima, BPBD berupaya untuk mengimplementasikan program-program yang ada dalam Dokumen RPB Daerah Kabupaten Bima dengan kerjasama lintas sektoral di instansi terkait penanggulangan bencana di Kabupaten Bima. Pencapaian upaya penanggulangan bencana akan optimal jika terjalin kerjasama antara BPBD Kabupaten Bima dengan SKPD dan Instansi terkait.

Dimana dalam melaksanakan upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Bima mengacu kepada budaya kerja yang dikembangkan di Kabupaten Bima. Adapun nilai budaya kerja yang dikembangkan di Kabupaten Bima adalah Proaktif, Disiplin, Inovatif, Kerjasama dan Transparan. Gabungan dari prinsip dasar dan budaya yang dikembangkan

di Kabupaten Bima diperlukan dalam implementasi kebijakan penanggulangan bencana.

Dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, BPBD Kabupaten Bima bertindak sebagai koordinator, fasilitator, motivator, sekaligus pelaksana program-program (Jakaria, 2022). Namun karena keterbatasan sumberdaya yang dialokasikan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana juga menjadi salah satu faktor pertimbangan utama BPBD Kabupaten Bima perlu menerapkan strategi khusus dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Strategi ini merupakan upaya dalam menata ulang peraturan yang mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana. Selain itu juga selaras dengan upaya peningkatan kapasitas kelembagaan yang terkait dengan upaya pengurangan risiko bencana (Daerah, 2019). Upaya perkuatan aturan dan kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaannya di Kabupaten Bima difokuskan untuk mencapai penguatan kerangka Hukum penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan peningkatan kapasitas serta akuntabilitas tata kelola penanggulangan bencana.

Harapannya tata kelola yang baik perlu menjadi sebuah komitmen bersama dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta pengawasan bersama menjadi komponen intinya. Dalam pengawasan bersama, dibutuhkan suatu mekanisme yang mampu menyediakan data yang dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan analisis manfaat-biaya. Analisis manfaat biaya ini dapat memperlihatkan nilai efektivitas program-program yang dijalankan untuk pengurangan risiko bencana dengan harapan dapat meningkatkan akuntabilitas tata kelola yang lebih baik (Syarifuddin et al., 2022).

Kemudian mengupayakan strategi penanggulangan bencana secara lebih terpadu di Kabupaten Bima, yang difokuskan melalui upaya mengintegrasikan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) kedalam RPJMD. Perencanaan ini ditindaklanjuti kedalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan seluruh SKPD. Untuk mencapai sasaran dalam mewujudkan perencanaan penanggulangan bencana terpadu dapat melalui program seperti, pengarusutamaan Penanggulangan Bencana dalam Pembangunan, pepaduserasian mekanisme penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Selanjutnya menerapkan paradigma penanggulangan bencana melalui pengembangan strategi pendidikan dan penyadaran pada pendidikan formal, nonformal, informal sebagai trend baru aktivitas penanggulangan bencana (Sadat, 2019). Upaya dasar yang dapat dilakukan dengan pemberdayaan hasil riset terapan baik dari perguruan tinggi maupun penelitian yang berkaitan penanggulangan bencana (Fransisk, et al,

2016). Salah satunya melalui kajian rasio perbandingan investasi (*cost benefit analys*) terhadap setiap fase penanggulangan bencana. Selain itu dapat dikembangkan juga hasil riset yang dapat diterapkan secara langsung oleh individu dan keluarga seperti pembangunan rumah aman Gempa, sumur resapan dan lainnya. Diharapkan dengan adanya beberapa riset terkait penanggulangan bencana di Kabupaten Bima dapat menurunkan kerentanan daerah terhadap risiko muti bahaya. Selain itu, melalui pendidikan dan pelatihan diharapkan adanya kesadaran dan pola pikir masyarakat dalam melakukan upaya pengurangan risiko bencana.

Selain itu, perlunya strategi dalam peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat di Kabupaten Bima yang difokuskan kepada program pemberdayaan masyarakat dan perkuatan fungsi kemitraan dalam pengurangan risiko bencana melalui optimalisasi pemberdayaan masyarakat untuk penanggulangan bencana. Langkah ini dilakukan untuk menciptakan kemandirian dan keterlibatan aktif masyarakat. Selain itu adanya peningkatan kemitraan multi pihak dalam penanggulangan bencana. Melalui perkuatan fungsi kemitraan dapat menggalang berbagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk pengurangan risiko bencana di luar anggaran APBN dan APBD. Tidak hanya itu, arah kemitraan yang bersifat cair lebih memungkinkan untuk penyelesaian masalah yang bersifat mendesak diluar proses birokrasi. Kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dikembangkan dalam upaya perlindungan perekonomian. Kemitraan ini dapat menggalang kontribusi dukungan partisipatif sektor swasta dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Kemudian agar tercipta efektivitas penyelenggaraan penanggulangan bencana perlu perkuatan Forum Pengurangan Risiko Bencana (Forum PRB). Melalui forum PRB Kabupaten Bima yang terdiri dari aktor lintas sektoral diharapkan mampu mempercepat kemajuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Aktor lintas sektoral yang merupakan pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan dapat memberikan kontribusi yang cukup besar dalam melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Bima. Untuk itu, penanggulangan bencana sebagai aktifitas yang membutuhkan peran *multi-stakeholder*, antar sektor, antara ilmu pengetahuan dan manajemen, maka seluruh elemen harus bisa berkolaborasi dalam pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya baik sumber daya manusia maupun keuangan agar pelaksanaan manajemen bencana bisa berjalan maksimal.

4. Simpulan

Penyelenggaraan manajemen prabencana di Kabupaten Bima di lakukan dengan pendekatan collaborative governance melalui prinsip koordinasi, keterpaduan, kemitraan, dan pemberdayaan. Dengan keterlibatan seluruh element sebagai perwujudan yang demokratis partisipatif dalam upaya penanggulangan bencana. Dalam pendekatan ini Badan Penanggulangan Bencana bertindak sebagai leading sector berupaya untuk mengimplementasikan program-program yang ada dalam Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bima dengan kerjasama lintas sektoral. Dalam implementasinya BPBD Kabupaten Bima bertindak sebagai koordinator, fasilitator, motivator, sekaligus pelaksana program-program. Melalui kolaborasi tersebut menghasilkan strategi penanggulangan bencana melalui perkuatan aturan dan kapasitas kelembagaan yang difokuskan untuk mencapai penguatan kerangka Hukum penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan peningkatan kapasitas serta akuntabilitas tata kelola penanggulangan bencana. Proses kerjasama ini juga telah mengintegrasikan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) kedalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan seluruh SKPD. Pemerintah Daerah juga bekerjasama dengan perguruan tinggi dalam mengembangkan hasil-hasil riset yang dapat diterapkan secara langsung oleh Pemerintah, individu dan keluarga seperti pembangunan rumah aman Gempa, sumur resapan dan lainnya. Diharapkan dengan adanya beberapa riset terkait penanggulangan bencana di Kabupaten Bima dapat menurunkan kerentanan daerah terhadap risiko multi bahaya.

Daftar Pustaka/Referensi

- Ahdi, D. (2015). Perencanaan Penanggulangan Bencana Melalui Pendekatan Manajemen Risiko. *Reformasi*, 5(1), 13–30.
- Andini, F. N., Anggraeiny, R., & Susilowati, T. (2020). Upaya Dinas Pemadam Kebakaran Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Di Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda. *Jurnal Administrasi Negara*, 8 (2)(1), 8978–8990.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Ariyanto, D. (2018). Koordinasi Kelembagaan Dalam Meningkatkan Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah. *Journal of Management Review*, 2(1), 161. <https://doi.org/10.25157/jmr.v2i1.1118>
- Asteria, D. (2016). Optimalisasi Komunikasi Bencana Di Media Massa Sebagai Pendukung Manajemen Bencana. *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.25008/jkiski.v1i1.30>
- Zaenuri. (2012). Mengelola Pariwisata-Bencana: Perlunya Perubahan Paradigma Pengelolaan Pariwisata Dari Adaptive Governance Menuju Collaborative Governance 157–168.
- Cahyono, S. A. T. (2020). Eksistensi Kampung Siaga Bencana (KSB) Tunas Bangsa dalam Penanggulangan Korban Bencana Alam. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan ...*, 237–250. <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/mediainformasi/article/view/2138>
- Daerah, D. P. (2019). Intergovernmental Dalam Penanganan Bencana Alam. 2(1), 66–81.
- Dhafri, A. (2021). Penerapan Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Pada Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan Dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Povinsi Riau. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Febrian, R. A. (2016). COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN (Tinjauan Konsep dan Regulasi). *Jurnal Kajian Pemerintah*, II, 200–208. <http://journal.uir.ac.id/index.php/wedana/article/view/1824> diakses pada tanggal 5 April 2019 pukul 02:55 WIB
- Fransiska Mulyani, Agustinus Gatot Bintoro, T. J. A. (2016). Mixed Integer Linear Programming untuk Pemodelan Distribusi Logistik Bencana. 15(2), 1–23.
- Haeril, Anilawati, N., & Suraya. (2021). Kapabilitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima dalam Penanggulangan Bencana. *Jurnal Tata Sejuta*, 7(1), 1–30. <http://ejournalstiamataram.ac.id/index.php/tatasejuta/article/view/218>

- Haeril, H., Irfadat, T., & Mas'ud, M. (2022). Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Dalam Pengurangan Risiko Bencana Alam Di Kabupaten Bima. *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 1-6. <https://doi.org/10.35326/jsip.v3i1.1889>
- Haeril, H., Mas'ud, M., Iradat, T., & Hendra, H. (2021). Penerapan Kebijakan Mitigasi Bencana (Fisik dan Nonfisik) dalam Mengurangi Risiko Bencana di Kabupaten Bima. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 3(1), 23-47. <https://doi.org/10.47650/jglp.v3i1.179>
- Heryati, S. (2020). Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana [The Role of Local Governments in Disaster Management]. *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP)*, 2(2), 139-146.
- Ibrahim, K., Emaliyawati, E., Yani, D. I., & Nursiswati, N. (2020). Pelatihan dan Simulasi Penanggulangan Bencana Bagi Masyarakat. *Media Karya Kesehatan*, 3(1), 27-38. <https://doi.org/10.24198/mkk.v3i1.23991>
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial "Pendekatan kualitatif dan Kuantitatif"* edisi kedua. Jakarta. Erlangga
- Irwan, I. (2018). Arahana Pemanfaatan Ruang Berbasis Mitigasi Bencana Banjir di Kota Bima Kecamatan Rasanae Timur. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/11888/>
- Jakaria, A. (2022). Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Majalengka Jawa Barat. 15(2), 1-23.
- Machruf, I. N., Hermawan, D., & Meutia, I. F. (2020). Penanggulangan Pra Bencana Alam Tsunami di Kabupaten Lampung Selatan dalam Perspektif Collaborative Governance. *Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 2(1), 129-146. <https://doi.org/10.23960/administrativa.v2i1.25>
- Pembangunan, J., Perencanaan, M., Diponegoro, U., Perencanaan, D., & Diponegoro, U. (2019). MODEL PEMETAAN RISIKO KEKERINGAN DI KABUPATEN BIMA, NUSA TENGGARA BARAT. 15(2), 138-150.
- Roskusumah, T. (2015). Analisis Model Komunikasi Efektif Dalam Komunikasi Mitigasi Bencana. In *Laporan Penelitian Hibah Bersaing (Vol. 1, Issue 1)*.
- Syarifuddin, S., Umar, U., Sukrin, S., Ihlas, I., & Ruslan, R. (2022). Strategi Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) dalam Penanggulangan Bencana Banjir Kabupaten Bima pada Bulan April Tahun 2021. *Bima Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 29-39. <https://doi.org/10.53299/bajpm.v2i1.120>
- Ulum, M. C. (2009). GOVERNANCE DAN CAPACITY BUILDING. 69-76.
- Zagarino, A., Cika Pratiwi, D., Nurhayati, R., & Hertati, D. (2021). Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Manajemen Bencana Erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang. *Jurnal Health Sains*, 2(5), 762-773. <https://doi.org/10.46799/jsa.v2i5.224>

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 tahun 2008 tentang Pembentukan, susunan, kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bima.